

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara yang sedang berkembang. Berbagai kegiatan diselenggarakan di negara ini dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kesejahteraan sosial merupakan suatu pengharapan setiap insan di dunia ini baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Salah satunya adalah organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang sudah sejak dulu menetapkan permasalahan ini menjadi bidang kegiatan masyarakat secara internasional (Suharto, 1997). PBB mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang dirancang untuk membantu individu atau komunitas memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan mempromosikan kesejahteraan dalam kebutuhan keluarga dan komunitas mereka. Di dalam Undang-undang 1945, kesejahteraan sosial dibahas secara khusus pada Bab XIV yang di memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa kesejahteraan sosial merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia.

Kesejahteraan sosial seringkali diartikan sebagai aktivitas mengorganisir dan mendistribusikan pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Penyelenggaraan perlindungan sosial terbagi menjadi dua bagian, yakni perlindungan sosial yang bersifat formal dan perlindungan sosial yang bersifat informal. Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial (*social safety nets*) yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh biasa disebut dengan istilah

memberdayakan individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Lebih jauh, pemberdayaan yaitu strategi rakyat agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Selain itu, pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai pengembangan masyarakat yang tidak terlepas dengan konsep kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*). Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat agar mendapatkan upah yang sesuai, serta penguatan masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan serta keterampilan, yang harus dilakukan secara multiaspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. (Kartasmita, 1996) berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya mengerahkan sumber daya dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat agar produktivitas masyarakat meningkat, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alamnya.

Kota Banjar berada di perbatasan wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2015, jumlah penduduk kota banjar adalah sebanyak 181.425 jiwa. Dari jumlah diatas, sebanyak 14,8 ribu orang termasuk dalam kategori miskin. Susenas tahun 2008, pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Kota Banjar mencapai Rp. 433.409,- per kapita per bulan dan mengalami stagnasi di tahun 2009, baru kemudian meningkat menjadi sebesar Rp. 474,921,- per kapita per bulan di tahun 2010. Dapat diartikan bahwa, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banjar masih bersifat jangka pendek, hanya pada ranah pemenuhan kebutuhan dasar hidup, seperti; program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan ekonomi lainnya. Sehingga, rumah tangga miskin masih belum mampu meningkatkan ekonomi keluarga dengan pengembangan usaha mandiri yang mampu menciptakan nilai daya beli bagi keluarganya sendiri.

Secara geografis, Kota Banjar memiliki lansekap yang beragam. Bagian utara, selatan dan barat kota merupakan wilayah berbukit-bukit. Kota ini

dibelah oleh Citanduy di bagian tengah. Terdapat pula sebagian kawasan pertanian, terutama di bagian pinggiran kota. Zona pertanian di Kota Banjar terdiri dari persawahan, perkebunan jati yang dikelola oleh Perhutani dan hutan hujan tropis biasa. Dengan beragam kondisi tersebut, dan data yang dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh indikasi bahwa kota Banjar membutuhkan adanya pendekatan yang lebih berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan kemiskinan yang ada, terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas perekonomian di kota Banjar.

Kehadiran pondok pesantren merupakan salah satu potensi utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di Kota Banjar. Dikutip dari surat kabar harian Kompas (2019, *online*) Pada tanggal 27 Februari tahun 2019, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Banjar untuk membuka Musyawarah Nasional Nahdatul Ulama. Sekaligus membuka acara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk ketahanan pangan dan aksi ekonomi rakyat. Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Dalam kondisi tersebut sekaligus menguatkan bahwa program pemberdayaan masyarakat juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama pada daerah perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan selama ini pembanguna di Jawa Barat masih terpusat pada daerah-daerah pariwisata, di wilayah Barat, terutama daerah yang masuk pada daerah penyangga ibu kota Jakarta.

Kondisi kemiskinan di lingkungan pesantren membutuhkan adanya dukungan yang lebih baik, tidak hanya berasal dari pemerintah melainkan dari berbagai komponen masyarakat lainnya yang saling berkesinambungan satu sama lain. Meningkatnya peran dan potensi masyarakat bukan hanya menumbuhkan dan menghasilkan secara materiil saja, namun juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Seperti pendapat Moeljarto dalam Supriatna (1997:114) “Partisipasi menimbulkan harga diri atau kesempatan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat”. Pengertian lain tentang pembangunan berbasis sumberdaya lokal adalah pembangunan partisipatif, seperti yang

disampaikan Sumodiningrat (1999:223)” model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal, khususnya di pedesaan, dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan (atau dalam suatu area *cluster*). Model pembangunan partisipatif menekankan upaya pengembangan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat”.

Permasalahan kemiskinan dapat diakibatkan oleh ketidakberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan (Solano Lara, Fernández Crispín, & López Téllez, 2018). Keterbelakangan masyarakat menyebabkan lemahnya kemampuan untuk mengakses sumber-sumber penghidupan (Rappaport, 1987). Kondisi seperti ini akan berdampak kepada rendahnya kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan di kota Banjar, maka dari itu perlunya sebuah dukungan partisipasi masyarakat dalam menghidupkan perekonomian.

Pembangunan dan pemberdayaan berbasis kearifan lokal dalam prakteknya menempatkan titik pangkal pembangunan pada ”level bawah” bukan pada ”level atas”, kemudian pada penerapannya beragam disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah. Pendekatan pemberdayaan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based resources management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan proyek. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada persiapan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian masa depan yang mencakup fisik dan juga non fisik seperti karakter, kompetensi, pendidikan, pelatihan dan keterampilan. Berdasarkan hal tersebut, maka membangun kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan dan koperasi menjadi sangat penting. Salah satu faktor pendukungnya adalah jumlah kelompok usia produktif yang besar dimana kelompok ini merekomendasikan piramida demografi

penduduk Indonesia. Pemerintah dalam upaya membangun kewirausahaan melalui strategi pemberdayaan koperasi mengembangkan sebuah keterampilan dalam upaya memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi. Sebagai upaya mengantisipasi kenaikan jumlah pengangguran, pemerintah memberdayakan UKM secara intensif dan berkesinambungan, serta pengembangan kewirausahaan bagi kaum akademis, seiring dengan upaya tersebut, pemerintah juga terus mengupayakan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha formal.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini kurang menekankan pemberdayaan dan bermotif karitatif, sehingga kurang memberikan dorongan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di hadapannya, terutama dalam bidang kewirausahaan. Salah satu upaya mengurangi kemiskinan di masyarakat adalah melalui pemberdayaan dan pendidikan kewirausahaan yang bertujuan agar masyarakat memiliki etos kerja, serta kemandirian dalam hidup. Dengan cara demikian diharapkan timbul kesadaran bahwa mengatasi masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan usaha produktif oleh mereka sendiri. Dan perlu difahamkan kepada masyarakat bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Sebagai salah satu dasar untuk mendorong kemandirian di tengah masyarakat itu sendiri.

Kewirausahaan sosial dianggap penting dalam mengurangi masalah ekonomi dan sosial di seluruh dunia. *Numerous recorded change-making attempts, from local context until global context, have raised our interest within this area (Poland, 2011; Skoll Centre for Social Entrepreneurship, 2018)*. Kesadaran akan konsep pemberdayaan yang dimiliki diterjemahkan ke dalam tindakan oleh beberapa orang yang memiliki keinginan tidak hanya mengembangkan diri sendiri tetapi juga orang lain. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam literatur dan aplikasi, serta pengukuran dampaknya (Mort et al., 2002). Di Indonesia, beberapa wirausaha sosial telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan kewirausahaan sosial praktisi di seluruh dunia karena kemampuan mereka untuk mengatasi

masalah dalam diri mereka lingkungan. Namun, inisiatif mereka belum tergambar dengan baik dalam literatur akademis. Banyak dari mereka, meskipun kadang-kadang dibatasi oleh struktur sosial, adalah perempuan. (Anggahegari et al., 2018)

Presiden memberikan ajakan kepada pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan untuk mengambil peran dalam penanggulangan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan pembangunan yang hadir di tengah masyarakat adalah Posdaya, yang merupakan sebuah gerakan dimana anggotanya melakukan kegiatan gerakan pembangunan secara nyata dimulai pada tingkat lingkungan paling bawah, yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Dusun. Dalam program Posdaya, keluarga merupakan anggota program yang menghidupkan kembali budaya Gotong Royong (kerja komunal) melalui keluarga kegiatan pemberdayaan, terutama untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan kewirausahaan. (Meiriki et al., 2020)

Salah satu penguatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kemampuan masyarakat, adalah dengan memanfaatkan lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial. Sehingga dapat mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan dirinya untuk menjadi salah satu bagian utama dalam pembangunan kehidupan yang lebih baik. Di masa yang akan datang program pemberdayaan akan menjadi salah satu fokus utama untuk menopang agenda pembangunan nasional, namun demikian pemberdayaan tidak hanya bisa dilakukan dengan memberikan penguatan secara ekonomi, melainkan dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang lengkap dan memberikan pendidikan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

Damandiri Foundation initiated development Pesantren based Family Empowerment Post. Pesantren-based Family Empowerment Post is a social and economic empowerment model that synergizes pesantren's religious function with social, economic, and family functions. Society, especially the Muslim community, always view pesantren as the center of various events,

not only religious events but also the community social events. By putting pesantren as the center of the program's activity, the activity will be relevant to the culture that lives and grows among society (Meiriki et al., 2020).

Dikutip dari jurnal internasional yang menyatakan bahwa *Innovative businesses are key drivers of economic growth* (Freeman, 2002) dalam (Alrubaishi et al., 2020). sebuah bentuk wirausaha yang inovatif akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Arab Saudi dianggap sebagai produsen kurma terbesar kedua di dunia serta pemimpin dalam konsumsi rata-rata per kapita kurma, selain mempunyai kandungan gizi, dan vitamin yang baik, kurma juga merupakan jenis buah yang diutamakan dan paling dinikmati di bulan Ramadhan bagi umat islam di seluruh penjuru dunia. Dari kutipan artikel di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi hal penting dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat, Arab Saudi dapat mengembangkan kemampuan masyarakatnya dalam pengolahan kurma dengan berbagai jenis olahan dalam upayanya mempertahankan kelangsungan kehidupannya.

Membangun kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan suatu hal yang dapat dilakukan di Lembaga pendidikan salah satunya yaitu pondok pesantren. Salah satu faktor pendukungnya adalah jumlah kelompok usia produktif yang besar. Membangun kewirausahaan melalui proses pembelajaran di pondok pesantren adalah suatu usaha dalam membangun partisipasi santri juga masyarakat yang ada di sekitar untuk mengantisipasi pengangguran, serta pengembangan kewirausahaan terutama bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi.

Pesantren merupakan lembaga sosial yang berada di tengah masyarakat dan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitarnya di bidang keagamaan juga perbaikan perekonomian. (Al-Hamdani, 2005) mengungkapkan bahwa pesantren adalah lembaga keagamaan yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat sehingga tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. (Danar, 2013) menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki fungsi strategis yaitu

sebagai lembaga pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi (Chusmeru et al., 2017).

Terdapat relevansi pesantren dengan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kesembilan (Pendidikan Keagamaan) Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Ditegaskan kembali oleh peraturan pemerintah no 55 tahun 2007 bab 1 pasal 1 ayat 4 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang berbunyi Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Menurut Sudjana (2010:33), bahwa pendidikan nonformal proses pembelajarannya menggunakan pendekatan bervariasi, diantaranya ialah pendekatan kontinum dari pedagogi ke andragogi atau sebaliknya. Pedagogi adalah ilmu dan seni mengajar anak-anak, sedangkan andragogi adalah ilmu dan seni membantu orang dewasa melakukan kegiatan belajar. (Rasyid, 2015)

Pesantren memiliki fungsi utama yang selalu diyakini dan dilakukan, ketiga fungsi tersebut diantaranya adalah: (1) menjadi pusat perekrutan dan pembinaan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*). (2) sebagai instansi yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). (3) sebagai lembaga yang memiliki kekuatan melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat (*agent of development*). Pesantren juga mempunyai

keterlibatan dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah masyarakat yang dinamis (Rimbawan, 2012). Tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan melalui peningkatan kompetensi ekonomi para santri sehingga pada suatu saat para santri telah kembali ke lingkungan masyarakatnya, mereka menjadi contoh yang baik dalam bidang ekonomi produktif atau sebagai kader-kader pemberdaya ekonomi, selain tetap menjalankan peran utamanya sebagai ustadz/ustadzah yang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu agama Islam. Usaha pemberdayaan masyarakat tersebut, bukan hanya tugas dan kewajiban pemerintah semata. Akan tetapi juga menjadi tanggung jawab institusi atau organisasi lokal (pondok pesantren) yang ada di masyarakat. (Rimbawan, 2012).

Pesantren pada hakikatnya memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya berdampingan dengan masyarakat. Kehidupan pesantren berasal, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga pondok pesantren harus memiliki peran dan fungsi pokok yang sejalan dengan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Serta sebagian yang lain sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pesantren membutuhkan gerakan kebaruan yang terintegrasi dalam upaya menghadapi permasalahan sosial kemasyarakatan. Pesantren juga harus mampu memberi keterampilan tertentu. Melihat kenyataan saat ini, masyarakat lebih tertarik pada kebutuhan pragmatis saat ini, masyarakat akan menginginkan sekolah ke jenjang paling tinggi, kemudian mendapatkan ijazah, lalu setelah lulus melamar pekerjaan untuk menjadi seorang pegawai, hal-hal tersebut dimaknai dengan kata “sukses” dalam menjalani hidup. Pondok pesantren yang identik dengan kedalaman ilmu agama, kemandirian alumni pesantren, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat menjadi tidak menarik minat masyarakat untuk bergabung atau menitipkan anaknya di pondok pesantren (Nurhadi et al., 2018).

Sebagian masyarakat memandang bahwa pondok pesantren hanyalah lembaga pendidikan yang bertugas untuk mendidik para santri hanya dengan

keilmuan agamanya. Ditemukan bahwa beberapa pengelola pesantren belum tertarik akan perubahan seperti modernisasi serta isu-isu hangat lainnya. Dengan adanya suatu pandangan mengenai mempertahankan pesantren berbasis tradisional, pandangan yang memunculkan pemahaman negatif mengenai modernisasi harus dihilangkan. Selain itu, kegiatan yang difokuskan di dalamnya hanyalah mengkaji kitab kuning, tanpa mengarahkan santrinya atau masyarakat yang hidup didalamnya terhadap perkembangan pesantren. Karena hal yang sangat penting adalah bagaimana menyukseskan pendidikan yang berbasis agama. Namun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan di pesantren saat ini telah mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan lainnya yakni memberdayakan santri untuk dapat hidup mandiri melalui beberapa program kewirausahaan dan kegiatan *entrepreneurship* lainnya. Salah satu contoh yaitu Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, pondok pesantren ini menganut prinsip ekonomi proteksi. Semua kebutuhan komunitas pondok diupayakan dipenuhi oleh mekanisme dan berbagai unit usaha yang dikembangkan di pondok pesantren. Pendiri dan pengasuh pondok selalu menekankan santrinya agar mandiri (Karni, 2009), dengan demikian mereka mampu menumbuhkan jiwa kemandirian ekonomi dan menatap masa depan dengan optimis.

Berdasarkan penelitian Nugroho, berbagai peran yang dilakukan oleh pesantren dalam pembangunan desa yaitu dalam bidang pendidikan dan keagamaan, bidang ekonomi, bidang pembangunan fisik, serta dalam bidang sosial budaya dan Kesehatan (Halim, 2005). Selain itu, Nawari juga menyimpulkan bahwa pondok pesantren mempunyai peranan dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yaitu adanya partisipasi pondok pesantren penyaluran dana bergulir kepada masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren (Faozan, 2006).

Pondok pesantren Miftahul Ihsan merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki beberapa program pembelajaran. Selain itu, pesantren Miftahul Ihsan berperan sebagai mitra pemerintah sekaligus sebagai pendamping masyarakat. Berbagai aktivitas pesantren di bidang

sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat telah memberikan beberapa manfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren Miftahul Ihsan. Selain peran pengelola pondok pesantren dalam mengembangkan kegiatan yang bermanfaat, adapun partisipasi warga sekitar yang dapat membantu berjalannya program maupun mengembangkan suatu kegiatan berupa pemberian bantuan program dan pembiayaan, mendorong terbentuknya wadah pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi santri di pesantren.

Pondok pesantren Miftahul Ihsan telah secara konsisten melaksanakan program pendidikan kewirausahaan bagi para santri dengan mengedepankan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan kewirausahaan yang lebih depan. Berbagai program pelatihan dilaksanakan secara berkesinambungan dan khusus dikembangkan bagi para santri dan masyarakat sekitar. Namun pelaksanaan kewirausahaan yang telah berjalan belum memberikan hasil yang memuaskan baik itu bagi para santri maupun masyarakat sekitar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengolah hasil pertanian pesantren menjadi penyebab kurangnya pengembangan keterampilan santri dalam melaksanakan kegiatan wirausaha di pondok pesantren. Pemberdayaan santri selama ini lebih banyak praktik yang belum memaksimal potensi masing-masing santri. Sehingga program kewirausahaan yang dijalankan belum memberikan kesempatan dalam membangun kemandirian, menggali potensi yang dimiliki dan saling menopang satu sama lain.

(Honig, 2004:258-273) memberikan gambaran model terbaik mengenai pendidikan kewirausahaan. Tiga model pedagogis dibandingkan, termasuk dua metode pengalaman alternative yaitu simulasi dan pendekatan kontingensi. Model kontingensi, sebagaimana diperkenalkan, menggunakan konsep Piaget tentang *equilibrium*, dan menegaskan untuk menyediakan alat kognitif dan fleksibilitas dalam mengakomodasi faktor lingkungan yang tidak diantisipasi yang dihadapi pengusaha di masa mendatang. Ruang

lingkup pendidikan kewirausahaan meliputi karakter, konsep, dan keterampilan. Ketiga ruang lingkup ini sepenuhnya harus bisa disampaikan kepada santri. Sedangkan materi yang disampaikan meliputi: (1) konsep dasar kewirausahaan; (2) jiwa dan sikap wirausaha; (3) pengembangan kreatifitas; (4) pengembangan ide usaha; (5) penyusunan rencana usaha; (6) memulai dan mengembangkan bisnis; (7) keterampilan teknis kewirausahaan (Widodo & Nugroho, 2014).

Model pendidikan pesantren yang memberikan paket komplit menjadi solusi dari permasalahan di atas. Selain memberikan pendidikan agama dan moral juga memberikan bekal hidup melalui kewirausahaan. Model pesantren yang dibutuhkan adalah Pondok pesantren yang terbuka dengan hal baru, mengikuti perkembangan zaman dimana pada zaman sekarang, kompetensi menjadi hal yang wajib dimiliki oleh seseorang sebagai bekal dalam bersaing dan bertahan dalam kehidupannya Model pesantren yang akan dihasilkan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. Melalui model pondok pesantren ini diharapkan santri mampu : (1) Memiliki Kebeningan Hati (*Qolbum Salim*) (2) Mandiri dan Bertanggungjawab (3) Berjiwa Kepemimpinan (*Leadership*) (4) Bermental Wirausaha (*Entrepreneurship*) (5) Mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Model pendidikan ini diharapkan mampu menumbuhkan jiwa *entrepreneur* bagi seorang Muslim, sehingga ia mampu hidup tanpa tergantung pada orang lain. Setidaknya ia dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban siapapun dan kehadirannya akan menjadi manfaat bagi umat, demi tegaknya syiar Islam yang kokoh, baik itu akhlakunya, pondasi iman yang kuat, dan yang tidak kalah penting, yaitu kekuatan dibidang ekonomi dan kemandirian yang nyata.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai model kolaborasi *rolling group system* santri dan masyarakat dalam pemberdayaan yang dilaksanakan di pondok pesantren Miftahul Ihsan Kota Banjar, Ciamis Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Merujuk pada pengamatan dalam studi pendahuluan dan beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Beberapa daerah di Negara Indonesia masih dalam kategori miskin, perlunya pendekatan yang lebih berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan kemiskinan yang ada, terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas perekonomian khususnya di Kota Banjar.
2. Paradigma pesantren sebagai lembaga keulamaan, menjadikan pesantren dipahami hanya sebagai tempat pembelajaran agama untuk mencetak ulama yang nantinya diterjunkan ke tengah masyarakat. Maka dari itu hal tersebut dipandang naif mengembangkan pesantren untuk keperluan diluar kerangka pendidikan agama dan keulamaan. Misalnya; pesantren untuk pendidikan usaha pertanian, peternakan dan lain sebagainya.
3. Pesantren dalam sejarah perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia terutama di pulau Jawa telah menunjukkan perannya sebagai sentra kekuatan potensi masyarakat. Hal ini terlihat dari sejarah perjuangan bangsa yang diperkuat dengan peran pesantren, simbol keagamaan dan tokoh Islam. Sehingga peran pesantren sangat mungkin untuk turut serta dalam mengembangkan kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk sosiobudaya maupun dalam pengembangan sentra ekonomi yang berbasis pada potensi lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat dari HAR. Tilaar (2003) tentang pengembangan masyarakat sebagai manusia melalui lembaga pendidikan pesantren yang telah mengakar kuat dalam sendi kehidupan masyarakat, terutama di kota Banjar
4. Pengembangan potensi kehidupan masyarakat, terutama di Kota Banjar membutuhkan penguatan dalam hal keterampilan wirausaha dan pemahaman konsep wirausaha yang modern saat ini. Keberadaan Pondok Pesantren Miftahul Ihsan sebagai salah satu pondok pesantren terbesar di Kota Banjar memiliki peran yang cukup besar untuk bisa

membangun keterampilan kewirausahaan bagi para santri. Untuk pengembangan kompetensi wirausaha tersebut, diperlukan support system yang menghubungkan antara santri, pendidikan pesantren dan praktisi dalam bidang kewirausahaan. Oleh karena itu, hal ini sangat menarik untuk dijadikan sumber penelitian dalam bentuk model kolaborasi *rolling group system* antara santri dan masyarakat dalam pemberdayaan yang dilaksanakan di Ponpes Miftahul Ihsan, Kota Banjar.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana model kolaborasi *rolling group system* santri dan masyarakat dalam pemberdayaan di pesantren Miftahul Ihsan?”

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implemementasi kolaborasi santri dan masyarakat dalam pemberdayaan di sekitar Pesantren Miftahul Ihsan selama ini?
2. Bagaimanakah implementasi model kolaborasi *rolling group system* santri dan masyarakat dalam pemberdayaan di sekitar Pesantren Miftahul Ihsan?
3. Bagaimanakah dampak model kolaborasi *rolling group system* terhadap karakter religius dan kemampuan wirausaha santri dan masyarakat di sekitar Pesantren Miftahul Ihsan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi kolaborasi santri dan masyarakat dalam pemberdayaan di sekitar Pesantren Miftahul Ihsan selama ini.
2. Mendeskripsikan implementasi model kolaborasi *rolling group system* santri dan masyarakat dalam pemberdayaan di sekitar Pesantren Miftahul Ihsan.
3. Mendeskripsikan dampak model kolaborasi *rolling group system* terhadap karakter religius dan kemampuan wirausaha santri dan masyarakat di sekitar Pesantren Miftahul Ihsan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah :

1. Dari Segi teori

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori pemberdayaan secara lebih menyeluruh dan mendalam dalam implikasinya di tengah kehidupan masyarakat terutama di Jawa Barat.

2. Dari Segi Kebijakan

Dalam konteks kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan arahan dalam pengembangan potensi sumberdaya di daerah perbatasan provinsi Jawa Barat.

3. Dari Segi Praktik

Dalam implementasi dilapangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan pendekatan pendidikan masyarakat yang berbasis pada penanganan masalah masyarakat di masa yang akan datang. Sehingga lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

4. Dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Dalam pengembangan isu, konteks penelitian ini lebih mengedepankan pada penguatan kapasitas kehidupan yang jauh lebih baik dan mendorong adanya partisipasi yang lebih aktif dari berbagai organisasi sosial dan lembaga pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan dari berbagai pengampu kepentingan maka, diharapkan program pemberdayaan berkembang jauh lebih baik dan lebih kuat.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Dalam penulisan struktur penelitian nantinya, terdiri dari lima bab utama meliputi bab pendahuluan, tinjauan teori, metode penelitian, pembahasan hasil dan kesimpulan.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran, berisi tentang konsep kewirausahaan santri, program pemberdayaan dan Implikasinya

Bagi Masyarakat serta Peran Pondok Pesantren dalam Program Pemberdayaan, selain itu pada bab ini juga ditelaah mengenai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang memaparkan tentang temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan dan dikaji kembali pada bagian pembahasan dengan melakukan komparasi antara temuan penelitian dan landasan teori yang digunakan.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, meliputi uraian mengenai pokok-pokok kesimpulan juga saran yang harus diutarakan kepada beberapa individu juga lembaga yang berkepentingan dengan adanya hasil penelitian.